

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKIP)**

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

2019

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenan-Nya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019. LKIP ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKIP ini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik dan juga merupakan alat kendali dan alat pemacu kinerja setiap unit organisasi dilingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Sebagai proses yang berkesinambungan, maka isi yang terkandung di dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran strategis yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama dan Kinerja Sasaran sebagaimana telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 serta merupakan kebulatan kesepakatan bersama yang dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara bersama-sama pula oleh seluruh jajaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah, memiliki komitmen besar terhadap pembangunan berkelanjutan. Komitmen tersebut tertuang dalam Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur periode 2016-2021 yaitu “ Terwujudnya Masyarakat Yang Madani, Dinamis, Mandiri dan Berdaya Saing Dalam Suasana Religius, Kebersamaan, Aman dan Sejahtera”. Untuk mewujudkan Visi tersebut telah ditetapkan satu Misi yang menjadi urusan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yaitu “ Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien “, selanjutnya Misi tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategi (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 yang digunakan sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2019.

Rencana Kerja Tahunan Tahun 2019 berfungsi sebagai pedoman kerja operasional yang harus dipertanggungjawabkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun 2019.

Kami sadar bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif senantiasa kami harapkan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di masa mendatang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2019 ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga LKIP ini bermanfaat dan dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja serta sebagai umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja pada masa yang akan datang khususnya bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam upaya mewujudkan *Good Governance* dan juga bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Sampit, Januari 2020

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

**Dra. Hj. PORAKTINA IKE HERITHA**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19650613 199312 2 001

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016-2021. LKIP juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahun 2019 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan oleh BPKAD yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021.

LKIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun 2019 ini lebih menekankan pada analisis di tatanan atau dimensi outcome dari pada output. Sebagaimana disampaikan, bahwa untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis, dengan 5 (lima) indikator kinerja dan merupakan iktisar hasil ( outcome ) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian output kegiatan. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif dan Efisien	Waktu Penetapan Perda APBD Kabupaten Kotawaringin Timur	Tepat Waktu	Tepat Waktu	99,67
	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja yang Telah ditetapkan	95%	94,26 %	99,22

Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Laporan Keuangan Daerah yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	90%	89,57 %	99,52
Meningkatnya Pengelolaan Barang Daerah yang Efektif dan Efisien	Persentase kesesuaian Barang Milik Daerah dengan Nilai Aset di Neraca	90%	86,49 %	96,10
Meningkatnya Pelayanan Publik	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas	90%	84,23 %	93,59

Dari ilustrasi tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk sasaran strategis Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif dan Efisien dengan indikator kinerja Waktu Penetapan Perda APBD Kabupaten Kotawaringin Timur dapat terealisasi Tepat Waktu dengan capaian kinerja 99,67% dan Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja yang Telah ditetapkan dapat terealisasi 94,26% dengan capaian kinerja 99,22% ini menunjukkan bahwa Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Timur dilakukan secara sinergi antar instansi pemerintah daerah sehingga penyusunan APBD dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku.

Untuk sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan indikator Persentase Laporan Keuangan Daerah yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dapat terealisasi 89,57% dengan capaian kinerja 99,52% artinya Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) sebagai entitas telah menyusun Laporan Keuangan sebanyak 5 (lima) laporan yaitu : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan CaLK yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis AkruaI dengan Kecukupan pengungkapan dalam Laporan Keuangan dan Kepatutan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan sasaran strategis Meningkatkan Pengelolaan Barang Daerah yang Efektif dan Efisien dengan indikator Persentase kesesuaian Barang Milik Daerah dengan Nilai Aset di Neraca dapat terealisasi 86,49% dengan capaian kinerja 96,10% hal tersebut didasarkan atas Efektifitas Sistem Pengendalian Intern terhadap Pencatatan, keberadaan,

kelengkapan bukti dan nilai Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan telah tercatat kedalam Sistem Informasi Barang Milik Daerah (SIMBADA).

Untuk sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik dengan indikator Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dapat terealisasi 84,23% dengan capaian kinerja 93,59%. Ini terlihat dari terbentuknya sitem kerja yang profesional dengan didukung oleh sarana, prasarana dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis yang telah ditetapkan berhasil dilaksanakan dengan baik dengan capaian kinerja 97,64 %.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
Kata Pengantar .....	i
Ringkasan Eksekutif .....	iii
Daftar Isi .....	vi
Daftar Tabel .....	vii
Daftar Lampiran .....	viii
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tugas dan Fungsi Sumber Daya Manusia.....	4
1.3. Isu Strategis .....	9
1.4. Sistematika Penyajian .....	10
BAB II    PERENCANAAN KINERJA .....	13
2.1. Rencana Strategis .....	13
2.2. Perjanjian Kinerja .....	16
BAB III   AKUNTABILITAS KINERJA.....	19
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	19
3.2. Realisasi Anggaran .....	29
BAB IV    PENUTUP .....	33

## DAFTAR TABEL

Tabel	2.2.	Perjanjian Kinerja BPKAD Kabupaten Kotawaringin Timur	16
Tabel	3.1.1.	Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Capaian Kinerja	20
Tabel	3.1.2.	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja	21
Tabel	3.1.3.	Capaian Indikator Sasaran Tahun 2017 dibandingkan Capaian Indikator Sasaran Jangka Menengah 5 (lima) Tahun sesuai Reviu Rencana Strategis BPKAD Tahun 2016-2021	22
Tabel	3.1.6.	Program dan Kegiatan dalam mendukung Pencapaian Indikator Kinerja	25
Tabel	3.2.	Realisasi Anggaran Per Program Per Kegiatan	29



## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2019
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019
3. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019
4. Pengukuran kinerja Tahun 2019

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat maka misi utama dari kedua Undang-Undang tersebut bukan hanya untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah tetapi yang lebih penting adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan manajemen keuangan guna lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 dan diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah, serta ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi serta Uraian Tugas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan, serta dalam rangka mewujudkan Good Government, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagai langkah awal terlebih dahulu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan penjabaran dari tujuan yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur 2016 – 2021.

Rencana Strategis tersebut menguraikan tentang Visi dan Misi serta faktor-faktor kunci keberhasilan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, dalam upaya melaksanakan pencapaian secara optimal dan untuk menilai atau melihat keberhasilan/kegagalan suatu Organisasi atau Unit Kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan pada unit kerja dapat dilihat melalui pengukuran kinerja dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam menyusun Rencana Strategis mengacu pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021. Sebagai hasil pra evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ) oleh Tim Kementerian Penadayaunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka dilakukan penyempurnaan atas komponen perencanaan daerah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021.

Visi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah **“Terwujudnya Masyarakat yang Madani, Dinamis, Mandiri dan Berdaya Saing dalam Suasana Religius, Kebersamaan, Aman dan Sejahtera”**

Disingkat menjadi Motto : **Manis Manasai.**

Visi merupakan arah pembangunan atau masa depan daerah yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang sejalan dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Visi yang disepakati dan ditetapkan untuk Kabupaten Kotawaringin Timur tidak terlepas dari ruang lingkup Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Adapun Misi Kabupaten Kotawaringin Timur pada RPJMD 2016-2021 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, terampil, sehat dan berakhlak;
2. Mengembangkan penguatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pemantapan ketahanan pangan, pengembangan produk unggulan daerah dan pemanfaatan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien;

4. Mengembangkan daya saing daerah melalui usaha perdagangan dan jasa, industri pengolahan, serta pariwisata dan budaya.

Berdasarkan misi tersebut diatas, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mengacu kepada misi ke-3 (tiga) dari RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2016 - 2021, yaitu ***“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien”***

Pencapaian kinerja suatu unit organisasi dapat diukur secara sistematis dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yaitu suatu sistem laporan untuk Pertanggungjawaban kepada Pejabat dan Publik atas kinerja yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap akhir anggaran. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan instansi yang bersangkutan.

Kewajiban Instansi Pemerintah untuk berakuntabilitas kinerja secara internal sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP ). Berdasarkan amanat tersebut, seluruh Instansi Pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah dari entitas tertinggi hingga unit kerja setingkat eselon II setiap tahun menyampaikan Laporan Kinerjanya kepada unit kerja yang berada pada tingkat lebih tinggi secara berjenjang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, melalui pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan ( disclosure ) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (BPKAD) sebagai instansi pemerintah juga memiliki kewajiban

untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) kepada Bupati Kotawaringin Timur. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) tahun 2018 merupakan perwujudan kewajiban BPKAD untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan Bupati dalam rangka mencapai misi Kepala Daerah secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis ( Renstra ) dan disusun pada periode tahun 2016-2021. Menggambarkan pencapaian sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan menyajikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Sasaran sebagaimana dalam Rencana Strategis ( Renstra ) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016-2021 dan Reviu Rencana Strategis ( Renstra ) BPKAD Tahun 2016-2021 serta tertuang dalam Perjanjian Kinerja /PK Tahun 2018. Disamping itu penyusunan LKIP ini juga bertujuan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

Selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dalam melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tersebut maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang didalamnya berisi konstelasi perencanaan strategik dan implementasinya serta tolok ukur keberhasilan berbagai indikator yang telah ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

## **1.2. Tugas dan Fungsi Sumber Daya Manusia**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi serta Uraian Tugas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai Tugas Pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD ;
- 2) Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD ;
- 3) Pengesahan DPA SKPD/DPPA SKPD ;
- 4) Pengendalian pelaksanaan APBD ;
- 5) Pemberian petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan sistem pengeluaran kas daerah ;
- 6) Penetapan SPD ;
- 7) Penyiapan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah ;
- 8) Pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah ;
- 9) Penyajian informasi keuangan daerah ;
- 10) Pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan barang / aset milik daerah ;
- 11) Pelaksanaan fungsi Bendaharawan Umum Daerah ;
- 12) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi ; dan
- 13) Pelaksanaan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah;
2. Penetapan Perda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Penetapan Standar Satuan Harga dan Analisa Standar Belanja Daerah;
4. Pembuatan Peraturan Daerah tentang pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Pembuatan Dokumen Barang Daerah;
6. Pembuatan Sistem Informasi Barang Daerah;
7. Perencanaan Aset / Barang Daerah;
8. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan Sistem dan program pengelola barang milik daerah;
9. Perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintah Kabupaten
10. Penetapan Perda tentang APBD dan perubahan APBD;
11. Penetapan kebijakan pengelola investasi dan aset daerah;

12. Pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah;
13. Pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah;
14. Pelaksanaan pengelolaan dan pembiayaan;
15. Pengelolaan dan penyelesaian piutang serta utang daerah;
16. Fasilitas pengelolaan aset daerah pemekaran skala;
17. Penetapan kebijakan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro;
18. Pelaksanaan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro;
19. Pengawasan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro, serta pembinaan dan pengawasan badan usaha milik daerah;
20. Penyimpan dan pengelola uang daerah;
21. Melaksanakan perbedaharaan kas daerah;
22. Pengendalian dan pengawas pelaksanaan APBD;
23. Pengelola data dan penghitungan alokasi DAU;
24. Pengelolaan DAU ( Dana Alokasi Umum );
25. Menyusun dan melaksanakan sistem penerimaan serta pengeluaran kas daerah;
26. Usulan program dan kegiatan kabupaten untuk di danai dari DAK;
27. pengelolaan DAK ( bagi kabupaten yang menerima DAK );
28. pengendalian pengelolaan pelaporan dana transfer ke daerah;
29. penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah dan desa;
30. penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan APB Desa;
31. penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan (urusan concurrent);dan
32. penetapan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.

Adapun Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangandan Aset Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi Serta Uraian Tugas adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
  2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  3. Sub Bagian Keuangan;

c. Bidang, terdiri dari :

1). Bidang Anggaran terdiri dari :

1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
2. Sub Bidang Pelaksanaan Anggaran
3. Sub Bidang Informasi Keuangan Daerah

2). Bidang Akuntansi terdiri dari :

1. Sub Bidang Akuntansi Daerah;
2. Sub Bidang Akuntansi, Konsolidasi dan Pelaporan
3. Sub Bidang Akuntansi Perangkat Daerah/Instansi.

3). Bidang Aset Daerah terdiri dari :

1. Sub Bidang Perencanaan dan Penggunasahaan Aset Daerah
2. Sub Bidang Pengamanan dan Pengendalian Aset Daerah
3. Sub Bidang Penatausahaan dan Informasi Aset Daerah;

4). Bidang Perbendaharaan terdiri dari :

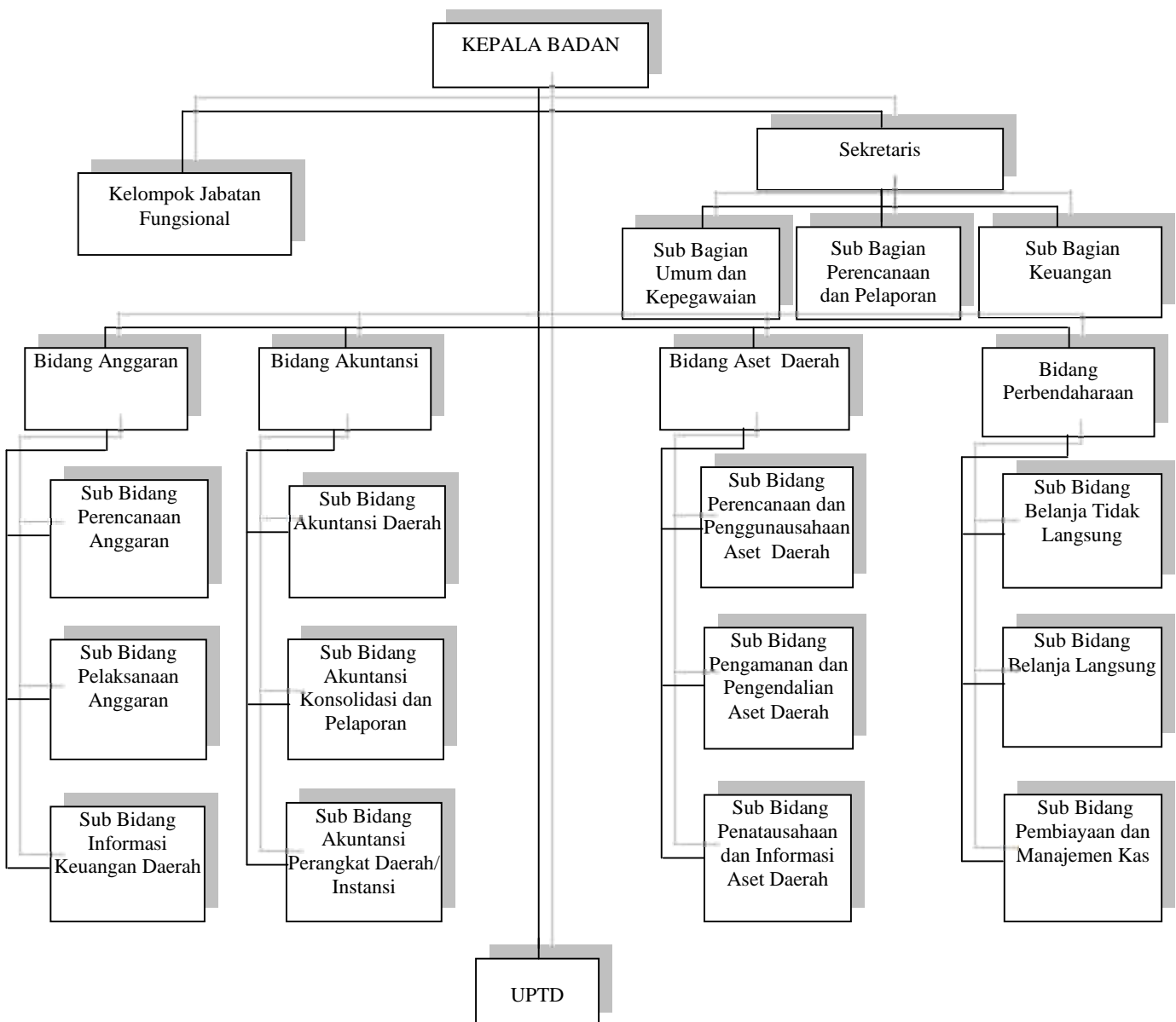
1. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung;
2. Sub Bidang Belanja Langsung;
3. Sub Bidang Pembiayaan dan Manajemen Kas;

d. Kelompok Jabatan Fungsional.



Struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi Serta Uraian Tugas adalah sebagai berikut :

### Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah



### 1.3. Isu Strategis.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya signifikan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di masa mendatang. Kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan dalam jangka panjang. Dalam menentukan isu-isu strategis ditempuh melalui :

1. Metode forum *Focussed Group Discussion (FGD)* dengan dihadiri oleh para stakeholder; dan atau SOPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur;
2. Situasi, kondisi yang terjadi atau perkembangan terkini.

Isu Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- Mekanisme/ sistem pengelolaan keuangan daerah masih belum tertata dan terintegrasi dalam satu sistem yang terpadu dari mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan hingga pelaporan/ pertanggungjawaban sebagai upaya pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Saat ini baru proses penganggaran sampai dengan pelaporan yang sudah menggunakan aplikasi dan telah terkoneksi dengan SOPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta aturan teknis yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, maka Pemerintah Daerah harus menyusun Laporan Keuangan Daerah Tahun 2019 yang telah berbasis Akrua. Dalam penerapan SAP berbasis akrual terdapat beberapa potensi permasalahan antara lain :
  - 1) Perbedaan akun anggaran dengan akun pertanggungjawaban yang masih harus dijembatani dengan konversi akun;
  - 2) Perbedaan akun penatausahaan Barang Milik Daerah dan akun pertanggungjawaban sehingga masih harus dijembatani dengan konversi akun;

- 3) Perlu adanya aturan teknis yang mengatur tentang penyusutan penyusutan aset baik penyusutan pertama kali maupun penyusutan berkala;
  - 4) Penyajian neraca pada saat penerapan akuntansi berbasis akrual masih belum disajikan sebagai nilai bersih, sebagai ilustrasi bahwa belum adanya penyusutan aset tetap sehingga belum dapat memberikan gambaran yang utuh terhadap penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah
- Seringnya terjadi perubahan regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah, sehingga kurangnya koordinasi dan komunikasi antara SOPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat memunculkan masalah tersendiri;
  - Penatausahaan, pengelolaan aset dan barang milik daerah belum berjalan optimal dalam upaya menghasilkan sistem informasi pengelolaan barang daerah yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien;
  - Sarana dan prasarana penunjang kegiatan di lingkup pengelolaan aset daerah masih relatif terbatas, sementara intensitas kerja dan mobilitas personil sangat tinggi;
  - Belum terpenuhinya aspek legal yang jelas atas status, luas dan harga tanah dan/atau bangunan guna penilaian aset pada aktiva tetap Neraca Daerah. Nilai aset yang dicantumkan dalam neraca masih merupakan nilai historis/nilai buku, sehingga masih diperlukan penilaian aset kembali untuk mendapatkan nilai pasar atas aset yang dimiliki Pemerintah Daerah.

#### **1.4. Sistematika Penyajian.**

Penyusunan LKIP Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam dokumen LKIP Tahun 2019 ini diuraikan tentang Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah direviu dalam Reviu Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016-2021, Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019, dan analisis terhadap kinerja serta rekomendasi yang ditujukan baik untuk perbaikan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah maupun Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur di

masa mendatang. Secara lebih rinci, muatan dokumen LKIP ini tergambar dalam sistematika laporan yang tersusun sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF, menyajikan ringkasan isi dari LKIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019.

## **BAB I        PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta pemasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

## **BAB II        PERENCANAAN KINERJA**

Bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

## **BAB III       AKUNTABILITAS KINERJA**

### **3.1. Capaian Kinerja Organisasi.**

Bab sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD;
- 4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 5) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 6) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

### 3.2. Realisasi Anggaran.

Pada bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

## BAB IV PENUTUP.

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi meningkatkan kinerjanya.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) IKU 2019
- 3) RKT 2019
- 4) Pengukuran Kinerja Tahun 2019
- 5) Lain-lain yang dianggap perlu.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. Rencana Strategis.**

Mengacu pada RPJMD dan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur 2016-2021 memuat tujuan, Sasaran, program dan kegiatan yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) serta dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPJMD yang telah ditetapkan tidak terlepas dari tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, maka indikator kinerja dan target yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2016-2021) adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan sarana dan prasarana kantor yang memadai melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung, penyediaan ATK, dan penyediaan keperluan lainnya;
2. Membuka akses kepada aparat BPKAD untuk meningkatkan profesionalisme dalam melanjutkan pendidikan tinggi sesuai dengan jurusan yang dibutuhkan, bimbingan teknis, pelatihan dan keterampilan yang sesuai;
3. Optimalisasi pengelolaan aset daerah melalui kajian evaluasi aset-aset daerah;
4. Memperbaiki manajemen aset, perbaikan kinerja pengelolaan aset, dan peningkatan kapasitas pengelolaan aset;
5. Optimalisasi tugas dan peran BPKAD dalam mencapai Opini WTP melalui peningkatan komitmen pimpinan daerah dan seluruh aparat Pemerintah Kabupaten .
6. Mempercepat penyelesaian tindak lanjut LHP dan action plan;
7. Memperbaiki sistem keuangan daerah;
8. Meningkatkan kualitas SDM dan kelembagaan, memperkuat regulasi daerah dalam mencapai Opini WTP.

### 2.1.1. Tujuan

Tujuan merupakan tahap perumusan strategis yang menunjukkan arah kebijakan sesuai dengan program dan kegiatan serta penjabaran dari Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2016-2021 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan indikator kinerja secara keseluruhan, serta merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun dengan tetap mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis.

Adapun rumusan tujuan didalam perencanaan strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 – 2021 berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi adalah “Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel”.

### 2.1.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang sasaran yang akan dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah :

- 1) Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien;
- 2) Meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah;
- 3) Meningkatkan pengelolaan barang daerah yang efektif dan efisien.
- 4) Meningkatkan pelayanan publik

### 2.1.3. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan mengenai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran perencanaan strategis dengan efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang komprehensif, maka dapat disusun strategi dan kebijakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai berikut :

#### Strategi :

- a) Terwujudnya laporan keuangan SOPD yang baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Terwujudnya sinergi antar instansi pemerintah daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD dalam tahun anggaran;
- c) Penguatan upaya reformasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah melalui transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d) Peningkatan sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dimutakhirkan dan terintegrasi;
- e) Terwujudnya sistem kerja yang profesional dengan didukung oleh sarana, prasarana dan SDM yang berkualitas;
- f) Terwujudnya layanan penatausahaan keuangan dan aset daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g) Mewujudkan manajemen keuangan dan aset daerah yang semakin berkualitas.

#### Kebijakan

- a) Penerapan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai jadwal dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- b) Penerapan penyusunan penganggaran sesuai dengan dokumen perencanaan, analisa standar belanja dan standar satuan harga;
- c) Terselenggaranya pemerintahan daerah yang baik dan bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- d) Optimalisasi penggunaan teknologi informasi;
- e) Optimalisasi tata kelola keuangan dan aset daerah yang berkualitas;
- f) Pelayanan yang profesional, transparan dan akuntabel dalam penatausahaan keuangan dan aset daerah;
- g) Mengupayakan terwujudnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan perundang undangan yang bertumpu pada kepentingan masyarakat yang didukung oleh sarana prasarana dan SDM yang berkualitas.



## 2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen Pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).

Perjanjian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2.

Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN
1	2	3
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif dan Efisien	Waktu Penetapan Perda APBD Kabupaten Kotawaringin Timur	Tepat Waktu
	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja yang Telah ditetapkan	95 %
Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Laporan Keuangan Daerah yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	90 %
Meningkatnya Pengelolaan Barang Daerah yang Efektif dan Efisien	Persentase kesesuaian Barang Milik Daerah dengan Nilai Aset di Neraca	90 %
Meningkatnya Pelayanan Publik	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas	90 %

Untuk mendukung keberhasilan dalam perjanjian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur melaksanakan 7 (tujuh) Program, yaitu :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 6) Program Peningkatan Promosi Dan Investasi Daerah
- 7) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Untuk menunjang keberhasilan program, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur melaksanakan 51 (lima puluh satu) kegiatan, yaitu :

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Penyedia Jasa Administrasi Keuangan
- 4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 5) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 6) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Pembangunan Kantor
- 8) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- 9) Penyediaan Makanan dan Minuman
- 10) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
- 11) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
- 12) Rapat-Rapat Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah
- 13) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- 14) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- 15) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
- 16) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
- 17) Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- 18) Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
- 19) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
- 20) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
- 21) Pendidikan dan Pelatihan Formal

- 22) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Itisar Realisasi Kinerja SKPD
- 23) Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
- 24) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
- 25) Pelaksanaan Sampit Expo
- 26) Pengendalian Pencairan Belanja Daerah
- 27) Pengelolaan dan Penatausahaan Kas Daerah
- 28) Penyusunan Administrasi Penyaluran Penggajian
- 39) Pengamanan Aset Barang Milik Daerah
- 30) Singkronasi Tabel Nomor Kode Barang dan kode Lokasi Barang
- 31) Lelang Aset Daerah
- 32) Rekonsiliasi Aset Barang Milik Daerah
- 33) Pembuatan Buku Inventaris Barang
- 34) Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
- 35) Penataan Barang Milik Daerah
- 36) Inventarisasi Aset Milik Daerah
- 37) Sistem Informasi Barang Milik Daerah
- 38) Penyusunan Standar Harga
- 39) Sosialisasi Perturan Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 40) Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- 41) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- 42) Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
- 43) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD
- 44) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD
- 45) Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah
- 46) Penyusunan Buku Pedoman Pelaksanaan APBD
- 47) Pedoman Penyusunan RKA SKPD
- 48) Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Belanja Hibah Bantuan Sosial
- 49) Penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
- 50) Sistem Informasi Akuntansi Instansi
- 51) Pembinaan Akuntansi PPK, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima & Pembantu Bendahara

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 diukur berdasarkan pencapaian kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja BPKAD pada tahun 2019. Akuntabilitas Kinerja ini menyajikan hasil pengukuran kinerja terhadap target capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja dari sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan beserta realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Strategis Tahun 2016-2021.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan kegiatan, dipergunakan Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- 85 s/d 100 = Sangat Berhasil
- 70 s/d < 85 = Berhasil
- 55 s/d < 70 = Cukup berhasil
- 0 s/d < 55 = Tidak Berhasil

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100.

#### **3.1. Capaian Kinerja Organisasi.**

Penilaian Akuntabilitas Kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2019 ini, diperoleh melalui analisis capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja dari sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tahun 2019, dengan proses analisis pengukuran, yaitu sebagai berikut :

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Organisasi;

- 4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 5) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 6) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Hasil pengukuran capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja dari sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tahun 2019, adalah sebagai berikut :

#### 3.1.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian Indikator Sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan Kinerja dengan realisasi tingkat capaian kinerja. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

Tabel 3.1.1.

Perbandingan antara Target dengan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif dan Efisien	Waktu Penetapan Perda APBD Kabupaten Kotawaringin Timur	Tepat Waktu	Tepat Waktu	99,67
	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja yang telah ditetapkan	95	94,26	99,22
Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Daerah yang Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	90	89,57	99,52

1	2	3	4	5
Meningkatnya Pengelolaan Barang Daerah yang Efektif dan Efisien	Persentase Kesesuaian Barang Milik Daerah dengan Nilai Aset di Neraca	90	86,49	96,10
Meningkatnya Pelayanan Publik	Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas	90	84,23	93,59

### 3.1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi capaian kinerja tahun 2019 dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

Tabel 3.1.2.  
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja  
Tahun 2016, 2017, Tahun 2018, dan Tahun 2019

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja 2016	Capaian Kinerja 2017	Capaian Kinerja 2018	Tahun 2019		Capaian Kinerja 2019
					Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8
Waktu Penetapan Perda APBD Kabupaten Kotawaringin Timur	Waktu	87%	88%	91%	Tepat Waktu	Tepat Waktu	99,67%
Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja yang telah ditetapkan	%	89%	95%	98%	95%	94,26%	99,22%
Persentase Pelaporan Keuangan Daerah yang Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	%	92%	94%	97%	90%	89,57%	99,52%

1	2	3	4	5	6	7	8
Persentase Kesesuaian Barang Milik Daerah dengan Nilai Aset di Neraca	%	92%	93%	95%	90%	86,49%	96,10%
Persentase Dukungan kelancaran Pelaksanaan Tugas	%	87 %	89%	91%	80%	84,23%	93,59

3.1.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Perencanaan Strategis Organisasi.

Secara umum Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Reviu Rencana Strategis ( Reviu-Renstra ) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016 – 2021. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai misi dan visi Kepala Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada Reviu Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 sebanyak 3 sasaran strategis dengan 3 indikator kinerja yang ditetapkan. Berikut disajikan capaian indikator sasaran dan perbandingan capaian indikator kinerja sasaran pada akhir periode Renstra sesuai Reviu Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016-2021, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1.3.  
Capaian Indikator Sasaran Tahun 2019 dibandingkan Capaian Indikator Sasaran Jangka Menengah 5 ( lima ) tahun sesuai Reviu Rencana Strategis (Reviu –Renstra) BPKAD Tahun 2016-2021

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Capaian Indikator Sasaran Tahun 2019	Capaian Indikator Sasaran Jangka Menengah	%
1	2	3	4	5
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif dan Efisien	Waktu Penetapan Perda APBD Kabupaten Kotawaringin Timur	Tepat Waktu	Tepat Waktu	93 %

1	2	3	4	5
	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja yang telah ditetapkan	99,22%	98,67 %	98 %
Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Daerah yang Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	99,52%	97,67 %	98 %
Meningkatnya Pengelolaan Barang Daerah yang Efektif dan Efisien	Persentase Kesesuaian Barang Milik Daerah dengan Nilai Aset di Neraca	96,10%	95,15%	95 %
Meningkatnya Pelayanan Publik	Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas	93,59%	90,25%	90%

#### 3.1.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Berdasarkan analisis identifikasi ada beberapa permasalahan penyebab kegagalan pencapaian kinerja diantaranya :

- Penerapan penyusunan penganggaran belum sepenuhnya sesuai dengan dokumen perencanaan, analisa standar belanja dan standar satuan harga.
- Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah belum sepenuhnya memenuhi substansi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan belum mencerminkan kesesuaian dengan dokumen perencanaan.
- Belum dimanfaatkannya secara optimal teknologi informasi dalam menunjang terciptanya sistem informasi keuangan yang transparan dan akuntabel.
- Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sarana dan prasarana serta sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Solusi yang diambil untuk peningkatan keberhasilan pencapaian kinerja oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam menindaklanjuti permasalahan tersebut diantaranya yaitu:



- a. Melakukan sinergi antar instansi pemerintah daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD dalam tahun anggaran;
- b. Penyempurnaan Regulasi mengenai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Penguatan upaya reformasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan pemerintah daerah melalui transparansi pengelolaan keuangan daerah;
- d. Peningkatan sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dimutakhirkan dan terintegrasi;
- e. Optimalisasi tata kelola keuangan dan aset daerah dengan didukung sarana, prasarana dan SDM yang berkualitas
- f. Pelayanan yang profesional, transparan dan akuntabel dalam penatausahaan keuangan dan aset daerah

#### 3.1.5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Dalam upaya untuk pencapaian indikator kinerja ada kalanya dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain yaitu :

- Faktor teknis, yang biasa berhubungan dengan pemakaian dan penerapan fasilitas secara lebih baik, penerapan metode kerja yang lebih efektif serta efisien dan penggunaan input yang lebih ekonomis.
- Faktor manusia, yang mempunyai pengaruh terhadap upaya-upaya dalam pencapaian indikator yang dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Di sini hal pokok penentu adalah motivasi yang memerlukan pendorong ke arah kemajuan dan peningkatan prestasi dalam mencapai sasaran.

Efisiensi diukur sebagai rasio output dan input. Dengan kata lain, pengukuran efisiensi menghendaki outcome, dan penentuan jumlah sumber daya yang dipakai untuk menghasilkan outcome tersebut. Dengan demikian, pengertian Indikator kinerja dapat didefinisikan sebagai rasio antara efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran pada tingkat kualitas tertentu (output) dan efisiensi penggunaan sumber daya (input).

#### 3.1.6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pada dasarnya semua program dan kegiatan terkait satu sama lain dan semuanya menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja secara

keseluruhan. Namun dilihat dari besarnya nilai anggaran dan target indikator kinerja utama (IKU) yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi, maka terdapat 2 (dua) program yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu :

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang terdiri dari 2 Kegiatan dengan nilai anggaran sebesar Rp. 302.954.000,00.
2. Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari 26 kegiatan dengan nilai anggaran sebesar Rp. 9.819.364.000,00.

Terkait dengan efisiensi penggunaan sumber daya khususnya anggaran keuangan sebagai input utama dari capaian target indikator kinerja yang menjadi output/outcome, maka terlihat dari tabel dibawah ini, bahwa persentase dari realisasi penggunaan anggaran berada pada angka 67 – 100 % (secara rata-rata = 90.68 %) , yang berarti cukup efisien bila diperbandingkan dengan tingkat capaian kinerja yang juga mencapai nilai 90 - 100% (secara rata-rata = 97,64 %) dari setiap program dan kegiatan yang terlaksana pada Tahun 2019.

Prosentase rata-rata capaian kinerja tahun 2019 sebesar 97,643% ini merupakan persentase rata-rata dari capaian kinerja 5 indikator kinerja pada 4 Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur seperti tergambar pada tabel berikut :

Tabel : 3.1.6.

Program dan Kegiatan dalam mendukung Pencapaian Indikator Kinerja  
“Waktu Penetapan Perda APBD Kabupaten Kotawaringin Timur”

No.	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1.	<i>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	Tepat Waktu	Tepat Waktu	99,67%
	Penyusunan Raperda tentang APBD	1 buah	1 buah	100 %
	Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD	1 buah	1 buah	100 %

1	2	3	4	5
	Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah	4 Data	4 Data	99,97%
	Penyusunan buku pedoman pelaksanaan APBD	1 buah	1 buah	99,59%
	Pedoman penyusunan RKA SOPD	1 buah	1 buah	98,48%
	Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%

“Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja Yang Telah Ditetepkan”

No.	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1.	<i>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	95	94,26	99,22%
	Pengendalian Pencairan Belanja Daerah	10.000 SP2D	9.766 SP2D	97,66%
	Penyusunan Administrasi Penyaluran Penggajian	1 Tahun	1 Tahun	100 %
	Pengelolaan dan Penatausahaan Kas Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %

“Persentase Laporan Keuangan Daerah Yang Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) ”

No.	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1.	<i>Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	90%	90%	100 %
	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	2 Buah	2 Buah	100 %
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1 Buah	1 Buah	100 %
2.	<i>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	90 %	89,57%	99,52%
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 buah	1 buah	100 %
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 buah	1 buah	100 %
	Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 buah	1 buah	68,43%
	Penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	1 buah	1 buah	60,88%
	Sistem Informasi Akuntansi Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %

1	2	3	4	5
	Pembinaan Akuntansi PPK, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	87,28%

“Persentase Kesesuaian Barang Milik Daerah Dengan Aset di Neraca”

No.	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1.	<i>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	90%	86,49%	96,10%
	Pengamanan Aset Barang Milik Daerah	3 Serifikat	2 Sertifikat	87,03%
	Sinkronisasi Tabel Nomor Kode Barang dan Kode Lokasi Barang	52 SKPD	52 SKPD	100%
	Lelang Aset Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
	Pembuatan Buku Inventaris Barang	1 Dokumen	1 Dokumen	99,00%
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	29,74%
	Penataan Barang Mlik Daerah	50 Buah	50 Buah	99,81%
	Inventarisasi Aset Milik Daerah	1 Tahun	1 Tahun	100%
	Sistem Informasi Barang Milik Daerah	1 Sistem	1 Sistem	100%
	Penyusunan Standar Satuan Harga	2 Dokumen	2 Dokumen	90,54%
	Sosialisasi Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah	52 SKPD	52 SKPD	100%

“Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas”

No.	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1.	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	90%	96,95%	96,95%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	635 buah	621 buah	97,79%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100%
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 bulan	12 bulan	100%
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	19 item	17 item	89,47%
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	22 jenis	22 jenis	100%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100%

1	2	3	4	5
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	52 jenis	49 jenis	94,23%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4 paket	4 paket	100%
	Penyediaan Makan dan Minuman	12 bulan	12 bulan	100%
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 bulan	12 bulan	100%
	Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	12 bulan	12 bulan	100%
	Rapat-Rapat Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah	300 orang	246 orang	82%
2.	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	90 %	94,73 %	94,73%
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	4 jenis	3 jenis	75%
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	3 paket	3 paket	100%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	4 unit	4 unit	100%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	9 unit mobil 21 unit motor	9 unit mobil 21 unit motor	100%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	3 jenis	3 jenis	100%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	59 unit	52 unit	88,13%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	1 unit	1 unit	100%
3.	<i>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</i>	90%	96,66%	96,66%
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	90 stel	87 stel	96,66
4.	<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	20%	20%	100%
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	9 orang	9 orang	100%
5.	<i>Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	90%	90%	100%
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen	4 dokumen	100%

### 3.2. Realisasi Anggaran

Dalam menjalankan kegiatan operasional Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur ditunjang dengan Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.709.257.050,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 17.329.028.339,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2.  
Realisasi Anggaran Per Program Per Kegiatan  
Tahun 2019

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
	BPKAD	<b>23.038.285.389,00</b>	<b>20.972.815.737,00</b>	<b>91,03</b>
	<b>Belanja</b>			
<b>I.</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>			
	Gaji, Tunjangan dll.	<b>5.709.257.050,00</b>	<b>5.258.724.965,00</b>	<b>92,11</b>
<b>II.</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>17.329.028.339,00</b>	<b>15.714.090.772,00</b>	<b>90,68</b>
<b>1.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>5.002.298.708,00</b>	<b>4.777.374.731,00</b>	<b>95,50</b>
	Penyedia Jasa Surat Menyurat	58.590.000,00	56.913.000,00	97,14
	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	977.929.009,00	967.505.239,00	98,93
	Penyedia Jasa Administrasi Keuangan	1.196.395.439,00	1.063.476.752,00	88,89
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	210.358.810,00	209.946.830,00	99,80
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	136.099.050,00	135.200.000,00	99,34
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	140.086.400,00	139.927.140,00	99,89
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Pembangunan Kantor	38.475.000,00	38.475.000,00	100,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	78.640.000,00	78.160.000,00	99,39
	Penyediaan Makanan dan Minuman	115.150.000,00	114.921.000,00	99,80
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	1.474.635.000,00	1.469.415.770,00	99,65
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	383.680.000,00	358.184.000,00	93,35
	Rapat-Rapat Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah	192.260.000,00	145.250.000,00	75,55
<b>2.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1.320.741.631,00</b>	<b>1.271.721.842,58</b>	<b>96,29</b>
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	40.000.000,00	39.893.000,00	99,73

1	2	3	4	5
	Pengadaan Meubelair	175.000.000,00	156.000.000,00	89,14
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	408.353.120,00	408.277.000,00	99,98
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	282.000.000,00	254.514.342,00	90,25
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	127.153.511,00	126.900.000,00	99,80
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	125.000.000,00	124.137.500,00	99,31
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	163.235.000,00	162.000.000,00	99,24
<b>3.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>133.020.000,00</b>	<b>123.410.000,00</b>	<b>92,78</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Harian	-	-	-
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	133.020.000,00	123.410.000,00	92,78
<b>4.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>491.690.000,00</b>	<b>411.461.788,00</b>	<b>83,68</b>
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	431.125.000,00	411.461.788,00	83,68
<b>5.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>531.914.000,00</b>	<b>309.218.000,00</b>	<b>58,13</b>
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	228.960.000,00	150.102.000,00	65,56
	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	26.210.000,00	17.613.000,00	67,20
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	276.744.000,00	141.503.000,00	51,13
<b>6.</b>	<b>Program Peningkatan Promosi Dan Investasi Daerah</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
	Pelaksanaan Sampit Expo	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
<b>7.</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>9.819.364.000,00</b>	<b>8.790.904.411,00</b>	<b>89,53</b>
	Pengendalian Pencairan Belanja Daerah	495.316.000,00	438.179.000,00	88,46
	Pengelolaan dan Penatausahaan Kas Daerah	548.020.000,00	501.299.000,00	91,47
	Penyusunan Administrasi Penyaluran Penggajian	621.835.000,00	528.906.000,00	85,06
	Pengamanan Aset Barang Milik Daerah	452.250.000,00	386.400.540,00	85,44

1	2	3	4	5
	Sinkronasi Tabel Nomor Kode Barang dan kode Lokasi Barang	72.200.000,00	59.949.000,00	83,03
	Lelang Aset Daerah	165.300.000,00	152.641.540,00	92,34
	Rekonsiliasi Aset Barang Milik Daerah	142.205.000,00	141.314.000,00	99,37
	Pembuatan Buku Inventaris Barang	72.165.000,00	66.391.000,00	92,00
	Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	31.940.000,00	9.250.000,00	28,96
	Penataan Barang Milik Daerah	170.480.000,00	168.030.000,00	98,56
	Inventarisasi Aset Milik Daerah	121.305.000,00	119.133.000,00	98,21
	Sistem Informasi Barang Milik Daerah	810.440.000,00	793.482.363,00	97,91
	Penyusunan Standar Harga	533.995.000,00	459.210.061,00	86,00
	Sosialisasi Perturan Pengelolaan Barang Milik Daerah	82.175.000,00	81.865.098,00	99,62
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	119.086.000,00	87.557.720,00	73,52
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	219.848.000,00	173.665.000,00	78,99
	Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	54.804.000,00	36.875.000,00	67,29
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	1.060.926.000,00	1.012.983.660,00	95,48
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	1.073.588.000,00	1.025.054.700,00	95,48
	Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah	2.029.155.000,00	1.883.552.249,00	92,82
	Penyusunan Buku Pedoman Pelaksanaan APBD	52.815.000,00	51.900.000,00	98,27
	Pedoman Penyusunan RKA SKPD	47.260.000,00	45.300.000,00	95,85
	Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Belanja Hibah Bantuan Sosial	223.336.000,00	163.463.000,00	73,19
	Penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	37.780.000,00	17.200.000,00	45,53
	Sistem Informasi Akuntansi Instansi	306.000.000,00	206.865.380,00	67,60
	Pembinaan Akuntansi PPK, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima & Pembantu Bendahara	275.140.000,00	180.437.100,00	65,58
Capaian Kinerja Keuangan				91,03



Dari tabel diatas menunjukan bahwa pada tahun 2019 secara keseluruhan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah telah menganggarkan untuk membiayai seluruh Program dan kegiatan sebesar Rp. 23.038.285.389,00 dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 20.972.815.737,00 atau capaian kinerja keuangan sebesar 91,03 %.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atas penggunaan anggaran dan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun 2016-2021. Di dalamnya diuraikan tentang capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Sasaran, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2019.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) juga merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang bermanfaat untuk :

- (1) Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*Good Govemance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
- (2) Menjalin instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan;
- (3) Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja;
- (4) Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Mengacu pada 4 (empat) sasaran strategis yang dijabarkan dalam 5 (lima) indikator Kinerja Utama yaitu :

- 1) Waktu Penetapan Perda APBD Kabupaten Kotawaringin Timur;
- 2) Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja Yang Telah Ditetapkan;
- 3) Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- 4) Persentase Kesesuaian Barang Milik Daerah dengan Nilai Aset di Neraca;
- 5) Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas.

Keberhasilan untuk Indikator sasaran strategis Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif dan Efisien dengan indikator kinerja Waktu Penetapan Perda APBD

Kabupaten Kotawaringin Timur dan Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja yang Telah ditetapkan terlihat bahwa sinergi antar instansi pemerintah daerah dalam Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Timur sehingga penyusunan APBD dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku, dan Pelayanan Perbendaharaan, Penatausahaan belanja Langsung dan tidak langsung serta pengelolaan kas dan dana transfer berjalan dengan lancar sesuai ketentuan dan batas waktu yang ditetapkan.

Sedangkan keberhasilan untuk sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan indikator Persentase Laporan Keuangan Daerah yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terlihat dari Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) sebagai entitas telah menyusun Laporan Keuangan sebanyak 5 (lima) laporan yaitu : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan CaLK yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis Akrua dengan Kecukupan pengungkapan dalam Laporan Keuangan dan Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Begitu pula dengan keberhasilan sasaran strategis Meningkatnya Pengelolaan Barang Daerah yang Efektif dan Efisien dengan indikator Persentase kesesuaian Barang Milik Daerah dengan Nilai Aset di Neraca ini terlihat dari Efektifitas Sistem Pengendalian Intern terhadap Pencatatan, keberadaan, kelengkapan bukti dan nilai Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan telah tercatat kedalam Sistem Informasi Barang Milik Daerah (SIMBADA).

Serta keberhasilan sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik dengan indikator Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas terlihat dari terbentuknya sistem kerja yang profesional dengan didukung oleh sarana, prasarana dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan di BPKAD pada Tahun Anggaran 2019 dapat dikategorikan berhasil dengan baik. Hal ini, dapat dilihat dari capaian Indikator Kinerja dan persentase capaian output kegiatan sebesar 97,64% dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 20.972.815.737,00 atau 91,03 %.

Menyadari adanya berbagai kendala yang dijumpai dalam pelaksanaannya tentu diupayakan pemecahannya serta dijadikan pemacu pada setiap tingkat dan tahapan pencapaian suatu keberhasilan, adapun pengelompokan upaya yang telah dilakukan adalah:

- a. Optimalisasi Sumberdaya Manusia untuk mencapai sasaran demi mewujudkan tujuan organisasi dengan cara mengarahkan personil sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- b. Upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia yang terbatas dengan cara :
  - 1) Mengikutsertakan Diklat Bimbingan Teknis mengenai pengelolaan keuangan, dan pengelolaan aset Daerah;
  - 2) Melakukan penyesuaian sistem pengelolaan anggaran dan pengelolaan aset daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - 3) Pemenuhan kebutuhan organisasi dalam pelaksanaan pelayanan internal dan eksternal dengan penetapan sistem pelayanan minimal.
- c. Melakukan koordinasi/konsultasi dan mengikuti berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset, baik dengan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten maupun kota lainnya.
- d. Melakukan perencanaan kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya dengan melihat kembali hasil kinerja tahun sebelumnya.

Dari beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2019 masih terdapat beberapa kegiatan yang terus berlanjut di tahun 2020. Hal ini dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi akhir tahun 2019, dimana masih diperlukan kegiatan tersebut pada waktu yang akan datang. Disamping itu juga sebagai pendorong peningkatan kinerja yang ada, sehingga target yang direncanakan dapat tercapai.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPKAD Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan harapan dapat dijadikan bahan koreksi dan introspeksi maupun kritik yang konstruktif dalam rangka meningkatkan kinerja yang lebih baik sebagai upaya mendukung terwujudnya tata kelola keuangan dan pemerintahan yang baik (good governance).

Lampiran - lampiran

**INDIKATOR KINERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Waktu Penetapan Perda APBD Kabupaten Kotawaringin Timur	Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
2.	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja yang Telah ditetapkan	%	90%	92%	94%	95%	97%	99%	100%
3.	Persentase Laporan Keuangan Daerah yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	%	85%	87%	88%	90%	95%	98%	100%
4.	Persentase kesesuaian Barang Milik Daerah dengan Nilai Aset di Neraca	%	80%	83%	85%	90%	95%	99%	100%
5.	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas	%	80%	85%	87%	90%	95%	98%	100%

Kepala Badan Pengelola Keuangan  
dan Aset Daerah Kabupaten Kotim,

**Dra. Hj. PORAKTINA IKE HERITHA**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650613 199312 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jl. Jend. A. Yani Nomor 14 Telp. (0531) 21302 Fax. (0531) 30393

**S A M P I T**

---

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dra. Hj. PORAKTINA IKE HERITHA**  
Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **H. SUPIAN HADI, S.Ikom.,M.E.**  
Jabatan : Bupati Kotawaringin Timur

Selaku atasan **Pihak Pertama** selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

**Pihak pertama** berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2020

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

**H. SUPIAN HADI, S. Ikom.,M.E.**

**Dra. Hj. PORAKTINA IKE HERITHA**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19650613 199312 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH**

Nama : Dra. Hj. PORAKTINA IKE HERITHA  
 NIP. : 19650613 199312 2 001  
 Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda, IV/c  
 Jabatan : Kepala Badan  
 Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  
 Tahun Anggaran : 2020

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET
1.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif dan Efisien	Waktu Penetapan Perda APBD Kabupaten Kotawaringin Timur Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja yang telah ditetapkan	Tepat Waktu 97 %
2.	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Daerah yang Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	95 %
3.	Meningkatnya Pengelolaan Barang Daerah yang Efektif dan Efisien	Persentase Kesesuaian Barang Milik Daerah Dengan Nilai Aset di Neraca	95 %
4.	Meningkatnya Pelayanan Publik	Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas	95 %

No.	PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	KET.
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.714.059.645,00	APBD
2.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	1.186.060.000,00	APBD
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	264.775.000,00	APBD
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	404.698.000,00	APBD
5.	Program Peningkatan Promosi Dan Investasi Daerah	30.000.000,00	APBD
6.	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Dan Keuangan Daerah	9.713.811.600,00	APBD

Sampit, Januari 2020

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Kepala Badan Pengelola Keuangan  
Dan Aset Daerah Kabupaten Kotim,

**H. SUPIAN HADI, S. Ikom.,M.E.**

**Dra. Hj. PORAKTINA IKE HERITHA**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650613 199312 2 001





**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jl. Jend. A. Yani Nomor 14 Telp. (0531) 21302 Fax. (0531) 30393

**S A M P I T**

---

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUHAMAD INDRA, S.Pi.**  
Jabatan : Sekretaris

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **Dra. Hj. PORAKTINA IKE HERITHA**  
Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Selaku atasan **Pihak Pertama** selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

**Pihak pertama** berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2020

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

**Dra. Hj. PORAKTINA IKE HERITHA**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650613 199312 2 001

**MUHAMAD INDRA, S.Pi.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19741017 200003 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH**

Nama : MUHAMAD INDRA, S.Pi.  
NIP. : 19741017 200003 1 003  
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I, IV/b  
Jabatan : Sekretaris  
Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  
Tahun Anggaran : 2020

No.	SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik	Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas	95%

No.	PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	KET.
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.714.059.645,00	APBD
2.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	1.186.060.000,00	APBD
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	264.775.000,00	APBD
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	137.180.000,00	APBD
5.	Program Peningkatan Promosi Dan Investasi Daerah	30.000.000,00	APBD

Sampit, Januari 2020

Kepala Badan Pengelola Keuangan  
dan Aset Daerah Kabupaten Kotim,

Sekretaris,

**Dra. Hj. PORAKTINA IKE HERITHA**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650613 199312 2 001

**MUHAMAD INDRA, S.Pi.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19741017 200003 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jl. Jend. A. Yani Nomor 14 Telp. (0531) 21302 Fax. (0531) 30393

**S A M P I T**

---

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dra. SITI HARTANIAH, M.M.**  
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **Dra. Hj. PORAKTINA IKE HERITHA**  
Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Selaku atasan **Pihak Pertama** selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

**Pihak pertama** berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2020

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

**Dra. Hj. PORAKTINA IKE HERITHA**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650613 199312 2 001

**Dra. SITI HARTANIAH, M.M.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19640412 199003 2 017

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH**

Nama : Dra. SITI HARTANIAH, M.M.  
NIP. : 19640412 199003 2 017  
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I, IV/b  
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi  
Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  
Tahun Anggaran : 2020

No.	SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Daerah yang Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	95 %

No.	PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	KET.
1.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	267.518.000,00	APBD
2.	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Dan Keuangan Daerah	938.756.000,00	APBD

Sampit, Januari 2020

Kepala Badan Pengelola Keuangan  
dan Aset Daerah Kabupaten Kotim,

Kepala Bidang Akuntansi,

**Dra. Hj. PORAKTINA IKE HERITHA**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650613 199312 2 001

**Dra. SITI HARTANIAH, M.M.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19640412 199003 2 017



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jl. Jend. A. Yani Nomor 14 Telp. (0531) 21302 Fax. (0531) 30393

**S A M P I T**

---

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SUHARTONO, A.KS.**  
Jabatan : Kepala Bidang Aset Daerah

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **Dra. Hj. PORAKTINA IKE HERITHA**  
Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Selaku atasan **Pihak Pertama** selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

**Pihak pertama** berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2020

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

**Dra. Hj. PORAKTINA IKE HERITHA**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650613 199312 2 001

**SUHARTONO, A.KS.**  
Pembina  
NIP. 19640510 198903 1 019

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH**

Nama : SUHARTONO, A.KS.  
NIP. : 19640510 198903 1 019  
Pangkat/Golongan : Pembina, IV/a  
Jabatan : Kepala Bidang Aset Daerah  
Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  
Tahun Anggaran : 2020

No.	SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1.	Meningkatnya Pengelolaan Barang Daerah yang Efektif dan Efisien	Persentase Kesesuaian Barang Milik Daerah dengan Nilai Aset di Neraca	95 %

No.	PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	KET.
1.	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Dan Keuangan Daerah	2.838.135.000,00	APBD

Sampit, Januari 2020

Kepala Badan Pengelola Keuangan  
dan Aset Daerah Kabupaten Kotim,

Kepala Bidang Aset Daerah,

**Dra. Hj. PORAKTINA IKE HERITHA**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650613 199312 2 001

**SUHARTONO, A.KS.**  
Pembina  
NIP. 19640510 198903 1 019



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jl. Jend. A. Yani Nomor 14 Telp. (0531) 21302 Fax. (0531) 30393

**S A M P I T**

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dra. NURILLA AGUSTINA**  
Jabatan : Kepala Bidang Anggaran

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **Dra. Hj. PORAKTINA IKE HERITHA**  
Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Selaku atasan **Pihak Pertama** selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

**Pihak pertama** berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2020

Kepala Badan Pengelola Keuangan  
dan Aset Daerah Kabupaten Kotim,

Kepala Bidang Anggaran,

**Dra. Hj. PORAKTINA IKE HERITHA**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650613 199312 2 001

**Dra. NURILLA AGUSTINA**  
Pembina  
NIP. 19680816 199603 2 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH**

Nama : Dra. NURILLA AGUSTINA  
NIP. : 19680816 199603 2 004  
Pangkat/Golongan : Pembina, IV/a  
Jabatan : Kepala Bidang Anggaran  
Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  
Tahun Anggaran : 2020

No.	SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif dan Efisien	Waktu Penetapan Perda APBD Kabupaten Kotawaringin Timur	Tepat Waktu

No.	PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	KET.
1.	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Dan Keuangan Daerah	4.452.579.000,00	APBD

Sampit, Januari 2020

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan  
Aset Daerah Kabupaten Kotim,

Kepala Bidang Anggaran,

**Dra. Hj. PORAKTINA IKE HERITHA**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650613 199312 2 001

**Dra. NURILLA AGUSTINA**  
Pembina  
NIP. 19680816 199603 2 004





**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jl. Jend. A. Yani Nomor 14 Telp. (0531) 21302 Fax. (0531) 30393

**S A M P I T**

---

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hj. YANTINUR, S.E., M.M.**  
Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **Dra. Hj. PORAKTINA IKE HERITHA**  
Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Selaku atasan **Pihak Pertama** selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

**Pihak pertama** berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2020

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

**Dra. Hj. PORAKTINA IKE HERITHA**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650613 199312 2 001

**Hj. YANTINUR, S.E., M.M.**  
Pembina  
NIP. 19730901 199903 2 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH**

Nama : Hj. YANTINUR, S.E.,M.M.  
NIP. : 19730901 199903 2 005  
Pangkat/Golongan : Pembina, IV/a  
Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan  
Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  
Tahun Anggaran : 2020

No.	SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif dan Efisien	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja yang telah ditetapkan	95 %

No.	PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	KET.
1.	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Dan Keuangan Daerah	1.484.341.600,00	APBD

Sampit, Januari 2020

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan  
Aset Daerah Kabupaten Kotim,

Kepala Bidang Perbendaharaan,

**Dra. Hj. PORAKTINA IKE HERITHA**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650613 199312 2 001

**Hj. YANTINUR, S.E., M.M.**  
Pembina  
NIP. 19730901 199903 2 005



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jl. Jend. A. Yani Nomor 14 Telp. (0531) 21302 Fax. (0531) 30393

**S A M P I T**

---

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H. SYAHRI FAZRIN, S.P., M.M.**  
Jabatan : Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penggunaan Aset Daerah

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **SUHARTONO, A.KS.**  
Jabatan : Kepala Bidang Aset Daerah

Selaku atasan **Pihak Pertama** selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

**Pihak pertama** berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2020

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

**SUHARTONO, A.KS.**  
Pembina  
NIP. 19640510 198903 1 019

**H. SYAHRI FAZRIN, S.P., M.M.**  
Pembina  
NIP. 19741119 199903 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH**

Nama : H. SYAHRI FAZRIN, S.P., M.M.  
 NIP. : 19741119 199903 1 004  
 Pangkat/Golongan : Pembina, IV/a  
 Jabatan : Kepala Sub Bidang Perencanaan dan  
 Penggunausahaan Aset Daerah  
 Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  
 Tahun Anggaran : 2020

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Tersajinya laporan barang milik daerah secara benar	Jumlah Buku Inventaris Barang Milik Daerah	1 Dokumen
2.	Meningkatkan tertib administrasi perencanaan pengadaan kebutuhan barang milik daerah dan pemeliharaan barang milik daerah serta perencanaan hibah barang	Jumlah daftar kebutuhan barang milik daerah (DKBMD), daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (DKPBMD) dan daftar rencana hibah barang	2 Dokumen
3.	Terlaksananya pengamanan Fisik Barang Milik Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengamanan barang milik daerah	50 Papan Nama Aset

No.	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	KET.
1.	Pembuatan Buku Inventaris Barang	92.505.000,00	APBD
2.	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	52.280.000,00	APBD
3.	Penataan Barang Milik Daerah	170.600.000,00	APBD

Sampit, Januari 2020

Kepala Bidang Aset Daerah,

Kepala Sub Bidang Perencanaan dan  
Penggunausahaan Aset Daerah,

**SUHARTONO, A.KS.**  
 Pembina  
 NIP. 19640510 198903 1 019

**H. SYAHRI FAZRIN, S.P., M.M.**  
 Pembina  
 NIP. 19741119 199903 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jl. Jend. A. Yani Nomor 14 Telp. (0531) 21302 Fax. (0531) 30393

**S A M P I T**

---

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YUAN HENDIANTO, S.E., M.M.**  
Jabatan : Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Informasi Aset Daerah

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **SUHARTONO, A.KS.**  
Jabatan : Kepala Bidang Aset Daerah

Selaku atasan **Pihak Pertama** selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

**Pihak pertama** berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2020

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

**SUHARTONO, A.KS.**  
Pembina  
NIP. 19640510 198903 1 019

**YUAN HENDIANTO, S.E., M.M.**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19750823 200604 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH**

Nama : YUAN HENDIANTO, S.E., M.M.  
NIP. : 19750823 200604 1 004  
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I  
Jabatan : Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Informasi Aset Daerah  
Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  
Tahun Anggaran : 2020

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Terlaksananya penatausahaan Aset Daerah dan Update Data dengan Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah (SIMBADA)	Jumlah alat pengolahan Manajemen Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur	1 Sistem
	Tersedianya Peta Lokasi Aset di Kabupaten Kotim	Jumlah lokasi aset daerah berbasis spasial	2 Kecamatan
2.	Tersusunnya Standar Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Kotim	Jumlah Dokumen Standar Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Kotim.	2 Dokumen
3.	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah SOPD/Pengguna Barang	52 SOPD/ Pengguna Barang

No.	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	KET.
1.	Sistem Informasi Barang Milik Daerah	804.540.000,00	APBD
2.	Penataan Aset Daerah Berbasis Spasial	109.500.000,00	
3.	Penyusunan Standard Satuan Harga	410.250.000,00	APBD
4.	Sosialisasi Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah	97.600.000,00	APBD

Sampit, Januari 2020

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

**SUHARTONO, A.KS.**  
Pembina  
NIP. 19640510 198903 1 019

**YUAN HENDIANTO, S.E., M.M.**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19750823 200604 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jl. Jend. A. Yani Nomor 14 Telp. (0531) 21302 Fax. (0531) 30393

**S A M P I T**

---

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ANDI MURDOKO, S.E.**  
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pengendalian Aset Daerah

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **SUHARTONO, A.KS.**  
Jabatan : Kepala Bidang Aset Daerah

Selaku atasan **Pihak Pertama** selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

**Pihak pertama** berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2020

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

**SUHARTONO, A.KS.**  
Pembina  
NIP. 19640510 198903 1 019

**ANDI MURDOKO, S.E.**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19621014 198603 1 015

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH**

Nama : ANDI MURDOKO, S.E.  
 NIP. : 19621014 198603 1 015  
 Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I  
 Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pengendalian Aset Daerah  
 Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  
 Tahun Anggaran : 2020

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Terlaksananya pengamanan Aset/Barang Milik Daerah	JumlahSertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur	2 Sertifikat
2.	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petugas dalam penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah SOPD yang memperoleh pembinaan teknis penatausahaan Barang Milik Daerah	52 SOPD (Pengurus dan Penyimpan Barang
3.	Tersusunnya dokumen penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penilaian Barang Milik Daerah	1 Dokumen
4.	Terselenggaranya kesesuaian nilai aset yang tercantum dalam neraca SOPD dengan nilai aset yang ada pada KIB SOPD	Jumlah Dokumen pencatatan aset sebagai bahan penyusunan neraca Pemerintah Daerah yang Akurat dan Akuntabel	6 Dokumen
5.	Terwujudnya efisiensi dan efektivitas penggunaan Barang Milik Daerah	Waktu pelaksanaan pemindahan dan penghapusan Barang Milik Daerah melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	1 Tahun

No.	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	KET.
1.	Pengamanan Aset Barang Milik Daerah	548.950.000,00	APBD
2.	Sinkronasi Tabel Nomor Kode Barang Dan Kode Lokasi Barang	95.570.000,00	APBD
3.	Lelang Aset Daerah	205.400.000,00	APBD
4.	Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	131.840.000,00	APBD
5.	Inventarisasi Aset Milik Daerah	119.100.000,00	APBD

Sampit, Januari 2020

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

**SUHARTONO, A.KS.**  
 Pembina  
 NIP. 19640510 198903 1 019

**ANDI MURDOKO, S.E.**  
 Penata Tingkat I  
 NIP. 19621014 198603 1 015





**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jl. Jend. A. Yani Nomor 14 Telp. (0531) 21302 Fax. (0531) 30393

**SAMPIT**

---

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **EDY SAMON, S.E.**  
Jabatan : Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **Dra. NURILLA AGUSTINA**  
Jabatan : Kepala Bidang Anggaran

Selaku atasan **Pihak Pertama** selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

**Pihak pertama** berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2020

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

**Dra. NURILLA AGUSTINA**  
Pembina  
NIP. 19680816 199603 2 004

**EDY SAMON, S.E.**  
Penata  
NIP. 19740705 200604 1 008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH**

Nama : EDY SAMON, S.E.  
NIP. : 19740705 200604 1 008  
Pangkat/Golongan : Penata  
Jabatan : Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran  
Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  
Tahun Anggaran : 2020

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	1 buah Rancangan Peraturan Daerah
2.	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	1 buah Rancangan Peraturan Daerah
3.	Tersusunnya Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pedoman penyusunan RKA SOPD	Jumlah Instrumen Kebijakan Pedoman Penyusunan RKA SOPD yang telah ditetapkan Berdasarkan Peraturan Kepala Daerah	1 buah Rancangan Peraturan Kepala Daerah

No.	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	KET.
1.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	1.063.566.000,00	APBD
2.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	1.052.847.000,00	APBD
3.	Pedoman Penyusunan RKA SKPD	47.260.000,00	APBD

Sampit, Januari 2020

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

**Dra. NURILLA AGUSTINA**  
Pembina  
NIP. 19680816 199603 2 004

**EDY SAMON, S.E.**  
Penata  
NIP. 19740705 200604 1 008



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jl. Jend. A. Yani Nomor 14 Telp. (0531) 21302 Fax. (0531) 30393

**S A M P I T**

---

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DEDI SUSANTO, S.E.**  
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pelaksanaan Anggaran

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **Dra. NURILLA AGUSTINA**  
Jabatan : Kepala Bidang Anggaran

Selaku atasan **Pihak Pertama** selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

**Pihak pertama** berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2020

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

**Dra. NURILLA AGUSTINA**  
Pembina  
NIP. 19680816 199603 2 004

**DEDI SUSANTO, S.E.**  
Penata  
NIP. 19731221 200003 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH**

Nama : DEDI SUSANTO, S.E.  
NIP. : 19731221 200003 1 001  
Pangkat/Golongan : Penata, III/c  
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pelaksanaan Anggaran  
Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  
Tahun Anggaran : 2020

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Tersusunnya Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pedoman pelaksanaan APBD	Jumlah Instrumen Kebijakan Pedoman Pelaksanaan APBD yang telah ditetapkan Berdasarkan Peraturan Kepala Daerah	1 buah Rancangan Peraturan Kepala Daerah
2.	Terwujudnya pengendalian pengelolaan tentang Hibah dan Bantuan Sosial	Jumlah Kegiatan Pengendalian Belanja Hibah dan Bantuan Sosial	1 Kegiatan

No.	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	KET.
1.	Penyusunan Buku Pedoman Pelaksanaan APBD	53.215.000,00	APBD
2.	Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial	255.536.000,00	APBD

Sampit, Januari 2019

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

**Dra. NURILLA AGUSTINA**  
Pembina  
NIP. 19680816 199603 2 004

**DEDI SUSANTO, S.E.**  
Penata  
NIP. 19731221 200003 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jl. Jend. A. Yani Nomor 14 Telp. (0531) 21302 Fax. (0531) 30393

**SAMPIT**

---

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **LAILA SYARIFA, S.E.**

Jabatan : Kepala Sub Bidang Informasi Keuangan Daerah

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **Dra. NURILLA AGUSTINA**

Jabatan : Kepala Bidang Anggaran

Selaku atasan **Pihak Pertama** selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

**Pihak pertama** berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2020

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

**Dra. NURILLA AGUSTINA**

Pembina

NIP. 19680816 199603 2 004

**LAILA SYARIFA, S.E.**

Penata Tingkat I

NIP. 19781020 200904 2 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH**

Nama : LAILA SYARIFA, S.E.  
NIP. : 19781020 200904 2 002  
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I  
Jabatan : Kepala Sub Bidang Informasi Keuangan Daerah  
Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  
Tahun Anggaran : 2020

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Tersusunnya data pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur	Jumlah Sistem Input Data Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur	1 Sistem

No.	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	KET.
1.	Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah	1.980.155.000,00	APBD

Sampit, Januari 2020

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

**Dra. NURILLA AGUSTINA**  
Pembina  
NIP. 19680816 199603 2 004

**LAILA SYARIFA, S.E.**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19781020 200904 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jl. Jend. A. Yani Nomor 14 Telp. (0531) 21302 Fax. (0531) 30393

**S A M P I T**

---

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **WIDODO RISDIANTO, S.E.**  
Jabatan : Kepala Sub Bidang Akuntansi, Konsolidasi dan Pelaporan

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **Dra. SITI HARTANIAH, M.M.**  
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi

Selaku atasan **Pihak Pertama** selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

**Pihak pertama** berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2020

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

**Dra. SITI HARTANIAH, M.M.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19640412 199003 2017

**WIDODO RISDIANTO, S.E.**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19740720 200604 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH**

Nama : WIDODO RISDIANTO, S.E.  
NIP. : 19740720 200604 1 003  
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I  
Jabatan : Kepala Sub Bidang Akuntansi, Konsolidasi dan Pelaporan  
Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  
Tahun Anggaran : 2020

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Terevaluasinya Laporan Keuangan Akhir Tahun SOPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SOPD	1 Laporan
2.	Tersusunya Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 buah Rancangan Peraturan Kepala Daerah
3.	Tersedianya Dokumen Neraca SOPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur	Jumlah Dokumen Neraca SOPD	7 Dokumen

No.	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	KET.
1.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	245.198.000,00	APBD
2.	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	101.636.000,00	APBD
3.	Sistem Informasi Akuntansi Instansi	300.600.000,00	APBD

Sampit, Januari 2020

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

**Dra. SITI HARTANIAH, M.M.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19640412 199003 2017

**WIDODO RISDIANTO, S.E.**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19740720 200604 1 003





**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jl. Jend. A. Yani Nomor 14 Telp. (0531) 21302 Fax. (0531) 30393

**S A M P I T**

---

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **UCHA ANDYANITA, S.E.**  
Jabatan : Kepala Sub Bidang Akuntansi Daerah

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **Dra. SITI HARTANIAH, M.M.**  
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi

Selaku atasan **Pihak Pertama** selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

**Pihak pertama** berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2020

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

**Dra. SITI HARTANIAH, M.M.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19640412 199003 2017

**UCHA ANDYANITA S.E.**  
Penata  
NIP. 19851013 200904 2 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH**

Nama : UCHA ANDYANITA, S.E.  
NIP. : 19851013 200904 2 005  
Pangkat/Golongan : Penata  
Jabatan : Kepala Sub Bidang Akuntansi Daerah  
Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  
Tahun Anggaran : 2020

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Terevaluasinya Laporan Semesteran SOPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran SOPD	2Laporan
2.	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 buah Rancangan Peraturan Daerah
3.	Tersedianya buku pedoman penyusunan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Buku Pedoman Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen
4.	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan PPK SOPD dan PPKD tentang penyusunan laporan akuntansi berbasis akrual	Jumlah Bimbingan Teknis peningkatan Kapasitas PPK SOPD dan PPKD dalam penerapan akuntansi berbasis akrual	1 kegiatan

No.	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	KET.
1.	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	22.320.000,00	APBD
2.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	250.000.000,00	APBD
3.	Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	36.520.000,00	APBD
4.	Pembinaan Akuntansi PPK, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan Dan Pembantu Bendahara SKPD	250.000.000,00	APBD

Sampit, Januari 2020

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

**Dra. SITI HARTANIAH, M.M.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19640412 199003 2017

**UCHA ANDYANITA S.E.**  
Penata  
NIP. 19851013 200904 2 005



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jl. Jend. A. Yani Nomor 14 Telp. (0531) 21302 Fax. (0531) 30393

**SAMPIT**

---

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HARIONO, S.P.**  
Jabatan : Kepala Sub Bidang Belanja Langsung

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **Hj. YANTINUR, S.E., M.M.**  
Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan

Selaku atasan **Pihak Pertama** selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

**Pihak pertama** berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2020

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

**Hj. YANTINUR, S.E., M.M.**  
Pembina  
NIP. 19730901 199903 2 005

**HARIONO, S.P.**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19620810 199403 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH**

Nama : HARIONO, S.P.  
NIP. : 19620810 199403 1 005  
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I  
Jabatan : Kepala Sub Bidang Belanja Langsung  
Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  
Tahun Anggaran : 2020

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Tercetaknya dokumen SP2D yang disyaratkan dalam administrasi pengelolaan keuangan Daerah	Jumlah Dokumen SP2D	1.000 SP2PD

No.	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	KET.
1.	Pengendalian Pencairan Belanja Daerah	470.763.600,00	APBD

Sampit, Januari 2020

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

**Hj. YANTINUR, S.E., M.M.**  
Pembina  
NIP. 19730901 199903 2 005

**HARIONO, S.P.**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19620810 199403 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jl. Jend. A. Yani Nomor 14 Telp. (0531) 21302 Fax. (0531) 30393

**SAMPIT**

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H. JUMA'EH, S.E.**  
Jabatan : Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **Hj. YANTINUR, S.E., M.M.**  
Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan

Selaku atasan **Pihak Pertama** selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

**Pihak pertama** berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2020

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

**Hj. YANTINUR, S.E., M.M.**  
Pembina  
NIP. 19730901 199903 2 005

**H. JUMA'EH, S.E.**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19780919 199403 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH**

Nama : H. JUMA'EH, S.E.  
NIP. : 19780919 199403 1 005  
Pangkat/Golongan : Penata  
Jabatan : Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung  
Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  
Tahun Anggaran : 2020

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Terfasilitasnya sistem penggajian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur	Waktu fasilitasi sistem penggajian yang mutakhir	1 Tahun

No.	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	KET.
1.	Penyusunan Administrasi Penyaluran Penggajian	527.726.000,00	APBD

Sampit, Januari 2020

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

**Hj. YANTINUR, S.E., M.M.**  
Pembina  
NIP. 19730901 199903 2 005

**H. JUMA'EH, S.E.**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19780919 199403 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jl. Jend. A. Yani Nomor 14 Telp. (0531) 21302 Fax. (0531) 30393

**S A M P I T**

---

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. FITERIANSYAH, S.E.**  
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pembiayaan dan Manajemen Kas

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **Hj. YANTINUR, S.E., M.M.**  
Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan

Selaku atasan **Pihak Pertama** selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

**Pihak pertama** berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2020

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

**Hj. YANTINUR, S.E., M.M.**  
Pembina  
NIP. 19730901 199903 2 005

**M. FITERIANSYAH, S.E.**  
Penata  
NIP. 19701213 199703 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH**

Nama : M. FITERIANSYAH, S.E.  
NIP. : 19701213 199703 1 003  
Pangkat/Golongan : Penata  
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pembiayaan dan Manajemen Kas  
Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  
Tahun Anggaran : 2020

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Terwujudnya administrasi daftar transaksi harian dan rekafitulasi transaksi harian yang tertib dan akuntabel	Jumlah Dokumen Daftar Transaksi Harian dan Rekafitulasi Harian dari Bendahara Umum Daerah	4 Dokumen

No.	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	KET.
1.	Pengelolaan Dan Penatausahaan Dana Kas Daerah	485.852.000,00	APBD

Sampit, Januari 2020

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

**Hj. YANTINUR, S.E., M.M.**  
Pembina  
NIP. 19730901 199903 2 005

**M. FITERIANSYAH, S.E.**  
Penata  
NIP. 19701213 199703 1 003





**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jl. Jend. A. Yani Nomor 14 Telp. (0531) 21302 Fax. (0531) 30393

**S A M P I T**

---

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. H. KARTI**  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **MUHAMAD INDRA, S.Pi.**  
Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan **Pihak Pertama** selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

**Pihak pertama** berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2020

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

**MUHAMAD INDRA, S.Pi.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19741017 200003 1 003

**Drs. H. KARTI**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19650620 199903 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH**

Nama : Drs. H. KARTI  
NIP. : 19650620 199903 1 002  
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan  
Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  
Tahun Anggaran : 2020

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Terwujudnya kelancaran komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah waktu tersedianya jasa telepon, air, listrik dan jasa layanan internet	12 bulan
2.	Terpeliharanya gedung kantor dengan baik	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	4 Unit
3.	Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang memperoleh penyediaan jasa service, penggantian suku cadang dan bahan bakar minyak/pelumas	9 Unit mobil dan 21 unit sepeda motor
4.	Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	3 Jenis
5.	Terpeliharanya peralatan gedung kantor dengan baik	Jumlah unit peralatan gedung kantor yang dipelihara	59 Unit

No.	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	KET.
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	755.243.507,00	APBD
2.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	228.200.000,00	APBD
3.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	144.000.000,00	APBD
4.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	142.000.000,00	APBD
5.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	125.000.000,00	APBD

Sampit, Januari 2020

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

**MUHAMAD INDRA, S.Pi.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19741017 200003 1 003

**Drs. H. KARTI**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19650620 199903 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jl. Jend. A. Yani Nomor 14 Telp. (0531) 21302 Fax. (0531) 30393

**S A M P I T**

---

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H. KARDIANSYAH, S.E.**  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **MUHAMAD INDRA, S.Pi.**  
Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan **Pihak Pertama** selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

**Pihak pertama** berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2020

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

**MUHAMAD INDRA, S.Pi.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19741017 200003 1 003

**H. KARDIANSYAH, S.E.**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19700912 199003 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH**

Nama : **H. KARDIANSYAH, S.E.**  
 NIP. : 19700912 199003 1 006  
 Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I  
 Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan  
 Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  
 Tahun Anggaran : 2020

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Terwujudnya kelancaran jasa surat menyurat	Jumlah Materai 3000 Jumlah Materai 6000	270 buah 365 buah
2.	Meningkatnya pelayanan Pegawai	Jumlah waktu terlaksananya peningkatan jasa pelayanan pegawai	12 bulan
3.	Terciptanya kebersihan dan kenyamanan di area kantor BPKAD	Jumlah pengadaan peralatan dan bahan kebersihan	19 item
4.	Terlaksananya pengadaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	22 Jenis
5.	Terlaksananya pengadaan barang cetakan, penggandaan dan penjiilidan	Jumlah waktu tersedianya barang cetakan, penggandaan dan penjiilidan	1 Tahun
6.	Terlaksananya pengadaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	52 macam
7.	Terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah paket bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4 paket surat kabar/majalah
8.	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat dan tamu	Jumlah waktu terlaksananya penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu	1 Tahun
9.	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas di luar daerah	Jumlah waktu tersedianya anggaran untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 Tahun
10.	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas di dalam daerah	Jumlah waktu tersedianya anggaran untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	1 Tahun
11.	Terlaksananya rapat evaluasi kinerja keuangan daerah	Jumlah peserta rapat evaluasi kinerja keuangan daerah	300 orang
12.	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor	4 Jenis

13.	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	3 Paket
14.	Terlaksananya rehab sedang gedung kantor BPKAD	Jumlah gedung kantor yang direhab	1 Unit
15.	Tersusunya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SOPD	Jumlah Dokumen perencanaan dan akuntabilitas SOPD	4 Dokumen
16.	Terlaksananya kegiatan pameran expo	Jumlah keikutsertaan pameran expo	1 kali
17.	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai yang mengikuti Bimtek	20 %

No.	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	KET.
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.500.000,00	APBD
2.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1.065.928.598,00	APBD
3.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	180.477.540,00	APBD
4.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	192.325.000,00	APBD
5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48.925.000,00	APBD
6.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Pembangunan Kantor	35.825.000,00	APBD
7.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	76.520.000,00	APBD
8.	Penyediaan Makanan dan Minuman	64.400.000,00	APBD
9.	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	982.200.000,00	APBD
10.	Rapat-Rapat Koordinasi Kedalam Daerah	207.840.000,00	APBD
11.	Rapat-Rapat dan Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah	84.875.000,00	APBD
12.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	29.000.000,00	APBD
13.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	307.000.000,00	APBD
14.	Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor	210.860.000,00	APBD
15.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	137.180.000,00	APBD
16.	Pelaksanaan Sampit Expo	30.000.000,00	APBD
17.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	264.775.000,00	APBD

Sampit, Januari 2020

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

**MUHAMAD INDRA, S.Pi.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19741017 200003 1 003

**H. KARDIANSYAH, S.E.**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19700912 199003 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jl. Jend. A. Yani Nomor 14 Telp. (0531) 21302 Fax. (0531) 30393

**S A M P I T**

---

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HERLINA**  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **MUHAMAD INDRA, S.Pi.**  
Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan **Pihak Pertama** selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

**Pihak pertama** berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Pebruari 2020

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

**MUHAMAD INDRA, S.Pi.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19741017 200003 1 003

**HERLINA**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19620106 198303 2 010

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH**

Nama : **HERLINA**  
NIP. : 19620106 198303 2 010  
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  
 Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  
 Tahun Anggaran : 2020

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Terwujudnya kelancaran jasa surat menyurat	Jumlah Materai 3000 Jumlah Materai 6000	270 buah 365 buah
2.	Meningkatnya pelayanan Pegawai	Jumlah waktu terlaksananya pningkatan jasa pelayanan pegawai	12 bulan
3.	Terciptanya kebersihan dan kenyamanan di area kantor BPKAD	Jumlah pengadaan peralatan dan bahan kebersihan	19 item
4.	Terlaksananya pengadaan barang cetakan, penggandaan dan penjilidan	Jumlah waktu tersedianya barang cetakan, penggandaan dan penjilidan	1 Tahun
5.	Terlaksananya pengadaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	52 macam
6.	Terpenuhiya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah paket bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4 paket surat kabar/majalah
7.	Tersedianya pakaian seragam kerja pegawai	Jumlah pakaian seragam kerja	90 Stel
8.	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai yang mengikuti Bimtek	20 %

No.	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	KET.
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48.600.000,00	APBD
2.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1.203.515.820,00	APBD



3.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	301.286.940,00	APBD
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	95.086.400,00	APBD
5.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Pembangunan Kantor	23.450.000,00	APBD
6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	68.640.000,00	APBD
7.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	74.520.000,00	APBD
8.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	294.975.000,00	APBD

Sampit, Pebruari 2020

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

**MUHAMAD INDRA, S.Pi.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19741017 200003 1 003

**HERLINA**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19620106 198303 2 010



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
Jl. Jend. A. Yani Nomor 14 Telp. (0531) 21302 Fax. (0531) 30393  
**S A M P I T**

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H. KARDIANSYAH, S.E.**  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **MUHAMAD INDRA, S.Pi.**  
Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan **Pihak Pertama** selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

**Pihak pertama** berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Pebruari 2020

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

**MUHAMAD INDRA, S.Pi.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19741017 200003 1 003

**H. KARDIANSYAH, S.E.**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19700912 199003 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH**

Nama : **H. KARDIANSYAH, S.E.**  
NIP. : 19700912 199003 1 006  
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan  
 Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  
 Tahun Anggaran : 2020

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Terwujudnya kelancaran jasa surat menyurat	Jumlah Materai 3000 Jumlah Materai 6000	270 buah 365 buah
2.	Meningkatnya pelayanan Pegawai	Jumlah waktu terlaksananya peningkatan jasa pelayanan pegawai	12 bulan
3.	Terciptanya kebersihan dan kenyamanan di area kantor BPKAD	Jumlah pengadaan peralatan dan bahan kebersihan	19 item
4.	Terlaksananya pengadaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	22 Jenis
5.	Terlaksananya pengadaan barang cetakan, penggandaan dan penjilidan	Jumlah waktu tersedianya barang cetakan, penggandaan dan penjilidan	1 Tahun
6.	Terlaksananya pengadaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	52 macam
7.	Terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah paket bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4 paket surat kabar/majalah
8.	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat dan tamu	Jumlah waktu terlaksananya penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu	1 Tahun
9.	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas di luar daerah	Jumlah waktu tersedianya anggaran untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 Tahun
10.	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas di dalam daerah	Jumlah waktu tersedianya anggaran untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	1 Tahun
11.	Terlaksananya rapat evaluasi kinerja keuangan daerah	Jumlah peserta rapat evaluasi kinerja keuangan daerah	300 orang
12.	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor	4 Jenis
13.	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	3 Paket
14.	Terlaksananya rehab sedang gedung kantor BPKAD	Jumlah gedung kantor yang direhab	1 Unit

15.	Tersusunya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SOPD	Jumlah Dokumen perencanaan dan akuntabilitas SOPD	4 Dokumen
16.	Terlaksananya kegiatan pameran expo	Jumlah keikutsertaan pameran expo	1 kali
17.	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai yang mengikuti Bimtek	20 %

No.	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	KET.
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.500.000,00	APBD
2.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1.065.928.598,00	APBD
3.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	180.477.540,00	APBD
4.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	192.325.000,00	APBD
5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48.925.000,00	APBD
6.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Pembangunan Kantor	35.825.000,00	APBD
7.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	76.520.000,00	APBD
8.	Penyediaan Makanan dan Minuman	64.400.000,00	APBD
9.	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	982.200.000,00	APBD
10.	Rapat-Rapat Koordinasi Kedalam Daerah	207.840.000,00	APBD
11.	Rapat-Rapat dan Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah	84.875.000,00	APBD
12.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	29.000.000,00	APBD
13.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	307.000.000,00	APBD
14.	Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor	210.860.000,00	APBD
15.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	137.180.000,00	APBD
16.	Pelaksanaan Sampit Expo	30.000.000,00	APBD
17.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	264.775.000,00	APBD

Sampit, Pebruari 2020

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

**MUHAMAD INDRA, S.Pi.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19741017 200003 1 003

**H. KARDIANSYAH, S.E.**

Penata Tingkat I

NIP. 19700912 199003 1 006

**PENGUKURAN KINERJA  
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
TAHUN 2019**

No .	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif dan Efisien	Waktu Penetapan Perda APBD Kabupaten Kotawaringin Timur	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tepat Waktu	Tepat Waktu	99,67 %	4.487.080.000	4.182.253.609	93,21
		Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja yang Telah ditetapkan	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	95 %	94,26 %	99,22 %	1.665.171.000	1.468.384.000	88,18
2.	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Laporan Keuangan Daerah yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	90 %	89,57 %	99,52 %	302.954.000	159.116.000	52,52
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				1.012.658.000	702.600.200	69,38
3.	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase kesesuaian Barang Milik Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	90 %	86,49 %	96,10 %	2.654.455.000	2.437.666.602	91,83

	yang Efektif dan Efisien	dengan Nilai Aset di Neraca							
--	--------------------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Meningkatnya Pelayanan Publik	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	90 %	84,23 %	93,59 %	5.002.298.708	4.777.374.731	95,50
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.320.741.631	1.271.721.842	96,95
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur				133.020.000	123.410.000	92,78
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				491.690.000	411.461.788	83,68
			Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				228.960.000	150.102.000	65,56

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset  
Daerah Kabupaten Kotim,

**Dra. Hj. PORAKTINA IKE HERITHA**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650613 199312 2 001



**RENCANA KINERJA TAHUNAN**  
**TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**  
**TAHUN 2019**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif dan Efisien	Waktu Penetapan Perda APBD Kabupaten Kotawaringin Timur	Tepat Waktu
		Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja yang Telah ditetapkan	95%
2.	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Laporan Keuangan Daerah yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	90%
3.	Meningkatnya Pengelolaan Barang Daerah yang Efektif dan Efisien	Persentase kesesuaian Barang Milik Daerah dengan Nilai Aset di Neraca	90%
4.	Meningkatnya Pelayanan Publik	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas	90%

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan  
Aset Daerah Kabupaten Kotim,

**Dra. Hj. PORAKTINA IKE HERITHA**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650613 199312 2 001